



POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

Doi : 10.21043/politea.v2i1.5419

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Palestina

Abdul Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

muheabdulaziz@gmail.com

Abstract

The Transnational Movement of Muslim Brotherhood in Egypt and Palestine. The Muslim Brotherhood is a large transnational movement in the Middle East. Its influence is very strong in education, then extends to the fields of politics, economics, and culture. This research will map the position of the Muslim Brotherhood in Egypt, trace geneology, and the concept of movement. In addition, it also analyzes the influence of the Muslim Brotherhood in Egypt and its influence on the social and political changes of Palestine. This will be explained using a descriptive analysis approach. This study concluded that the policies of the ruling leaders in Egypt experienced changes and ups and downs, especially in pre and post-revolution. This is related to its interaction with the Muslim Brotherhood. The struggle of the Muslim Brotherhood with the Egyptian government is often colored by conspiracies, oppression, which are then greeted with demonstrations and competition for power.

Keywords: Muslim Brotherhood, Revolution, Ideology, Authoritarianism

Pendahuluan

Ikhwanul Muslimin, selanjutnya disingkat IM adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang besar. Organisasi ini tersebar di kurang lebih 70 negara, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di wilayah lainnya. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al-Banna (1324-1368 H/ 1906-1949 M) di Mesir, pada bulan April 1928. Organisasi ini menyeru untuk kembali kepada Islam, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengajak untuk menerapkan syari'at Islam dalam realitas kehidupan, mengembalikan kejayaan Islam dan berdiri menentang arus sekularisasi di kawasan Arab dan dunia Islam (Fathi Yakan, 2002, pp. 12-13).

Dalam Anggaran Dasar (AD) IM disebutkan, bahwa tujuan gerakan organisasi ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial serta meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat. Tujuan lain IM adalah membebaskan seluruh negeri Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong Liga Arab dan Pan Islamisme, membentuk negara yang melaksanakan semua hukum dan ajaran Islam seutuhnya dan mendukung kerjasama internasional untuk melindungi hak dan kebebasan serta berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang baru(Sahwal, 2014, p. 6).

Sedangkan agenda gerakan yang dilakukan IM meliputi, gerakan dakwah melalui media massa, mempersiapkan delegasi dan utusan ke dalam dan luar negeri, mendidik anggota sesuai dengan sistem dan prinsip IM, mengupayakan terwujudnya aturan-aturan publik yang lebih Islami, mendirikan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan lembaga-lembaga *amr ma'ruf nahi munkar*(Sahwal, 2014, pp. 248–249). Pada mulanya, organisasi ini sangat menarik perhatian golongan rendah yang serba kekurangan, tetapi lambat laun gerakan ini menyebar juga ke kalangan kaum intelektual dan beberapa pemimpin yang berpengaruh. Al-Banna sendiri bukan hanya seorang orator ulung, tetapi juga seorang organisator yang berhasil(George Lenczowski, 1993, p. 309).

Gerakan IM memulai langkahnya dari Provinsi Ismailiah, kemudian kantor pusatnya pindah ke kota Kairo dan berkembang ke sebagian besar daerah di Mesir. Pada akhir tahun empat puluhan, jumlah cabang IM mencapai 3000 buah yang mempunyai banyak sekali anggota. Kemudian gerakan IM menyebar dan tertanam kuat di negeri-negeri Arab di Sekitar Mesir, seperti Syria, Palestina, Yordania, Libanon, Irak, Yaman, Sudan dan lain-lain. Gerakan ini juga mempunyai banyak sekali pengikut di pelbagai belahan pelosok dunia.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi berbasis Islam yang berdiri pada tahun 1928 di Mesir(Sihbudi, 1991, p. 102). Berdasarkan pandangan sejarah, bahwa sejak kelahirannya (yaitu, IM) di Mesir selalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penjatuhan Raja Farouk I dari kursi pemerintahan oleh Para Perwira Bebasbersama IM(Basyar, 1988, pp. 85–88), yang disebut Revolusi 23 Juli 1952. Peristiwa percobaan pembunuhan Gamal Abdul Nasser di lapangan Al-Mansyiyah(Quthb, 2012, p. 27), Kairo oleh militan Islam garis keras, IM dicurigai sebagai pelaku dan pada akhirnya dibubarkan pemerintah yang berkuasa. Penembakan Presiden Anwar Sadat ketika menghadiri parade militer tahun 1981, pun IM terkena dampaknya.

Revolusi yang menimpa Mesir pada tahun 2011, diyakini juga terdapat keterlibatan IM. Relevan dengan Revolusi Mesir tahun 2011 memungkinkan teori efek domino mengenai kawasan tersebut. Keberhasilan revolusi Tunisia menjatuhkan Presiden Zine Abidine Ben Ali memberikan inspirasi Mesir untuk menjatuhkan pemimpin otoriter, Presiden Hosni Mubarak. Menurut catatan sejarah, Presiden Hosni Mubarak memimpin Mesir telah mencapai usia 30 tahun (1981-2011). Presiden Hosni Mubarak selama memimpin Mesir menerapkan Undang-undang (UU) Kondisi Darurat Militer Nomor 162 Tahun 1958, guna menekan Organisasi IM. Berkembangnya fenomena baru “Revolusi” dalam dunia politik di Timur Tengah tidak dapat dipungkiri, karena ada kesamaan persoalan yang dihadapi antara negara-negara di kawasan ini.

Pembahasan

Sejarah Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin (IM) dalam bahasa Arab yaitu *Al-Ikhwan Al-Muslimun* atau secara ringkas yaitu Al-Ikhwan dalam bahasa Melayu yaitu saudara se-Muslim atau dalam bahasa Inggris yaitu Muslim Brotherhood, merupakan suatu gerakan berdasarkan ideologi Islam yang jaringannya

berskala antarbangsa yang mempunyai pengaruh di negara-negara di dunia (Brooke, n.d., p. 45). Ikhwanul Muslimin yang nantinya disebut IM, merupakan gerakan Islamis tertua di dunia dan juga sejak lama sebagai kelompok oposisi terbesar di Mesir (Ibrahim, 2013, p. 26).

Ikhwanul Muslimin didirikan di Mesir pada tahun 1928, pembentukan itu dipelopori oleh Hassan al-Banna dan enam orang rekannya (Nasution, 1992, p. 304). Sebelum terbentuknya Ikhwanul Muslimin, pendirinya, Hassan al-Banna, telah lebih dahulu melakukan kegiatan-kegiatan da'wah. IM memiliki prinsip dasar untuk memperjuangkan ajaran Islam sebagai ajaran dasar dan kehidupan bermasyarakat dan beragama (Efendi, 2001, p. 309). Dalam gerakan dan pemikirannya, Ikhwanul Muslimin mewakili masyarakat Mesir yang semakin resah dengan ulah pemimpin politik dan tokoh intelektual Mesir yang sekuler (Abdulah, 2002), dan IM menjadi pionir bagi gerakan Islam lain di berbagai negeri Muslim.

Sejalan dengan pandangan komperhensif IM mengenai Islam, kelompok ini memiliki berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan yang dilandasi oleh paham Islam, seperti pendidikan ideologi (*at-Tarbiyah al-Aqaidiyyah*), pendidikan spiritual (*at-Tarbiyah al-Ruhaniyah*), pendidikan akhlak (*at-Tarbiyah al-Khuluqiyah*), pendidikan sosial (*at-Tarbiyah al-Ijtima'iyyah*), pendidikan intelektual (*at-Tarbiyah al-Aqliyyah*), pendidikan politik (*at-Tarbiyah al-Siyasah*) dan pendidikan olahraga (*at-Tarbiyah al-Jismiyah*) (Abd al-Monein Said Aly and Manfred W. Wenner, n.d., p. 304).

IM berusaha menghilangkan sekularisme dan mengembalikan kembali Mesir kepada Al-Qur'an sebagai pedoman dasar aturan kehidupan di keluarga, masyarakat dan Pemerintah Mesir, dengan prinsip IM yaitu: "*Allah is our objective, The Prophet is our Leader, Qur'an is our law, Jihad is our way, dying in the way of Allah is our highest hope*" (Banna, 2005, p. 21). Ketika berbicara soal politik dan hubungannya dengan IM, patut untuk ditegaskan bahwa kekuasaan bukan menjadi sasaran utama IM. Tujuan mereka adalah untuk mewujudkan sistem Islami, kapanpun sistem ini terwujud, dan siapapun orang yang mewujudkannya, IM siap menjadi prajurit dan pendukungnya (Syaiikh, 2013, p. 97). Sejalan dengan tujuannya, cara pandang IM terhadap Islam tidaklah sederhana, karena menurut mereka Islam adalah "*The Way of Life*" (jalan kehidupan) dan Islam merupakan ideologi yang menyeluruh (comprehensive) untuk kehidupan pribadi ataupun kehidupan bermasyarakat (Paison, 2009, p. 75).

Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai salah satu gerakan politik Islam yang paling berpengaruh dalam kebangkitan gerakan Islam di Timur-Tengah dan dunia pada Abad ke 20. Gerakan IM berhasil menjadi pionir bagi lahirnya ide penyatuan gerakan agama dengan politik. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi model gerakan serupa di Yordania, Palestina, Turki, Aljazair dan berbagai negara Islam lainnya. Gerakan IM menyebarkan ide transnasionalisme Islam dan adanya kebangkitan Islam pasca runtuhnya kekhalifahan di Turki (Ziad, 2011, p. 41).

Sampai saat ini Ikhwanul Muslimin terus berusaha untuk menghilangkan paham sekularisme di Mesir dan ditatanan global, dengan tantangan utama ialah untuk melawan nilai sekularisme yang sudah menjadi nilai yang meng-hegemoni. Maka dari latar belakang masalah ini peneliti merumuskan masalahnya seperti yang dibawah ini. kehidupan bermasyarakat Mesir, terutama tercermin di perilaku dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya di masa Hosni Mubarak. Sebagai organisasi yang berlandaskan Islam, Ikhwanul Muslimin bertujuan untuk menghilangkan sekularisme dan berjuang untuk mengembalikan Mesir kepada Al Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun dalam perjalanannya, Ikhwanul Muslimin menghadapi banyak tantangan, seperti tekanan politik dari pemerintah dengan melarang kegiatan organisasinya, menghalangi pergerakan politik IM dengan membuat larangan pembentukan partai politik yang berdasarkan agama dan memenjarakan banyak kader IM. Namun

Ikhwanul Muslimin bisa bertahan dan gerakannya mampu berkembang di balik tekanan-tekanan yang mereka terima. Proses perjuangan sosial dan politik yang dilakukan Ikhwanul Muslimin dalam melawan sekularisme di era Hosni Mubarak menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Perkembangan Gerakan Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan keagamaan di Mesir yang beberapa dekade berikutnya menyandang predikat “mainstream” gerakan, bukanlah merupakan “total break” dari ide dan gerakan kebangkitan sebelumnya, seperti Jamaluddin al-Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh dan beberapa ulama lain. Apalagi al-Banna misalnya sebagai pendiri Gerakan Ikhwanul Muslimin, telah menyatakan dirinya sebagai pengikut atau penganut “Gerakan Salafiyah” Muhammad Abduh (Aziz, 2002, p. 114). Singkatnya, Ikhwanul Muslimin kemudian menemukan basis awal gerakannya di kota Ismailiyah dan bertahan hingga tahun 1932 sebelum menyatakan kepindahannya ke kota Kairo.

Di kota ini, al-Banna bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Ismailiyah dan sekitarnya. Melalui lembaga masjid dan sekolah, ia mulai mensosialisasikan diri seperti dikemukakan dalam esai terakhir yang ditulisnya sendiri bahwa al-Banna tidak hanya memberi pelajaran di sekolah pada siang hari, tetapi juga memberi materi pelajaran pada masyarakat umum di malam hari, khususnya orang tua wali siswa yang sebagian besar berprofesi buruh, pedagang kecil, dan pegawai pemerintah. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai untuk membuat solid gerakan adalah memperluas jaringan keanggotaan dan kemudian melakukan koordinasi.

Al-Banna dan para Ikhwan mengejar tujuan ini dengan mengadakan kontak langsung, dan tour ke berbagai daerah di luar kota Ismailiyah pada hari libur mingguan dan selama liburan akhir tahun, mengadakan ceramah di masjid, juga di rumah-rumah, klub-klub, dan tempat-tempat pertemuan publik lainnya. Penggunaan masjid sebagai sentral gerakan, membuat penceramah mempunyai legitimasi dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Dalam waktu singkat lebih kurang empat tahun, bertambah banyak kantor cabang Ikhwanul Muslimin sepanjang tepi timur Delta di Ismailiyah, Port Sa'id, Suez, dan Abu Suwair, dan di tepi barat Delta sejauh Syubra Khit.

Di Ismailiyah, untuk kepentingan sentral aktivitas gerakannya, Ikhwanul Muslimin mengambil sebuah rumah sederhana sebagai kantor sekretariat. Bantuan finansial perusahaan (Terusan Suez) dan pinjaman dari pedagang lokal cukup membantu penyelesaian pembangunan masjid pada tahun 1930. Kemudian dibangun sebuah sekolah putra, sebuah klub dan sebuah sekolah putri. Semua cabang baru Ikhwanul Muslimin dibangun dengan cara yang sama: pembangunan kantor sekretariat diikuti dengan pembangunan proyek lainnya masjid, sekolah, klub, industri rumah yang bertujuan sebagai pusat kepentingan atau pusat kegiatan masyarakat (Banna, 1966, p. 92).

Seperti yang pernah dialami beberapa gerakan, juga terjadi pada gerakan Ikhwanul Muslimin, yaitu muncul sikap antipati dan perlawanan terhadap kebijakan pengembangan gerakan ini, atau bahkan tekanan hegemoni berkuasa, dalam hal ini Pemerintah Mesir dan kelompok imperialis secara tidak langsung diramalkan akan terjadi di tahun-tahun terakhir peradaban Ikhwanul Muslimin dalam skala yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh al-Banna sekalipun. Beberapa tuduhan diarahkan kepadanya oleh pihak-pihak tersebut (Mitchell, 1968, p. 8). Persoalan internal di kalangan Ikhwanul Muslimin yang sempat mencuat ke permukaan adalah polemik tentang pemilihan wakil pengganti pemimpin gerakan ini di Ismailiyah menjelang mutasi al-Banna ke kota Kairo sebuah peristiwa yang pertama kali terjadi dalam gerakan ini (Mitchell, 1968, pp. 9–

10). Kenyataan ini menggugah al-Banna untuk melakukan tindakan yang bijak dan tentunya dapat diterima oleh semua pihak, baik para ikhwan dan yang non-ikhwan.

Fenomena ini sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan gerakan ini menuju puncak kekuatan dan prestasi sejarah yang diinginkan. Maka sebagai pemrakarsa sebuah gerakan keagamaan, al-Banna dituntut berfikir lebih optimal dan mencari langkah-langkah yang efektif dan strategis, sehingga gerakan ini menjadi solid, tidak rapuh, stabil dan menguat atau bahkan memiliki akarnya di beberapa wilayah pergerakan, utamanya di Ismailiyah. Hal ini mutlak harus dilakukan, mengingat situasi masyarakat Mesir yang homogen dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Bila diklasifikasi, terdapat tiga stratifikasi sosial yang berbeda jauh, kelompok elit terdiri dari penguasa dan aristokratis yang berorientasi Barat, kelompok menengah terdiri dari ulama dan menengah lainnya, dan kelompok bawah terdiri dari petani, buruh, pedagang kecil dan lainnya. Dalam perspektif gerakan keagamaan, masyarakat sebagai obyek diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok khusus (Mulkhan, 1996, p. 5).

Al-Banna dan para ikhwan disebut sebagai kelompok inti gerakan kemudian melangkah lebih ekspansif dalam mengembangkan gerakan, yaitu menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa pihak di luar wilayah Ismailiyah. Setelah empat tahun, gerakan keagamaan yang dipimpinnya sudah menjalin hubungan dengan Asosiasi Kebudayaan Islam di kota Kairo, yang dipimpin oleh Abdurrahman al-Banna, salah seorang adiknya dan juga anggota Ikhwan, yang bekerja di Kairo setelah ia meraih gelar Diploma Sekolah Tinggi Perdagangan. Kedua organisasi ini, al-Ikhwân al-Muslimûn dan Asosiasi Kebudayaan Islam melebur menjadi satu untuk membentuk cabang pertama Ikhwan di Kairo. Penggabungan tersebut memberi akses organisasional bagi Ikhwanul Muslimin dalam 'lingkaran Islam' di ibu kota. Hampir seluruh anggota perhimpunan di Kairo dengan cepatnya menjadi pimpinan Ikhwan dalam setting perkotaan yang baru.

Kebijakan menjalin kerja sama dan bergabung dengan beberapa perhimpunan di Kota Kairo sebagaimana dikemukakan, memberi jalan atau langkah awal operasional yang bagus bagi Ikhwan. Al-Banna dan para ikhwan pun memilih kota Kairo sebagai sentral kegiatan dan pengendali gerakan Ikhwanul Muslimin. Standar lain untuk mengukur perkembangan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah gerakan yang sangat diperhitungkan adalah: pertama, ketetapan meposisi kantor sekretariat gerakan di pusat kota Kairo. Dari bentuk bangunan sederhana di kawasan ramai menjadi bangunan megah dengan halamannya di jalan utama, lengkap dengan sekretaris dan staf-staf administrasi yang bekerja full time dan digaji. Kedua, ide strategis membentuk wilayah dan beberapa muktamar, mulai dari muktamar nasional berkala, muktamar regional, muktamar khusus (mahasiswa, pimpinan cabang, dsb) hingga muktamar rakyat khusus tentang pembebasan imperialisme (Ruslan, 1989, p. 388) yang diadakan secara berkala untuk mendiskusikan dan merencanakan program, mengesahkan program, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan yang telah dibuat. Muktamar-muktamar ini juga menggambarkan potret kegiatan Ikhwan secara umum selama rentang waktu 1932-1939.

Muktamar I, diselenggarakan pada bulan Mei 1933. Agenda utama yang dibahas adalah berkaitan dengan problem kegiatan kristenisasi dan upaya-upaya penanggulangannya (Mitchell, 1968, p. 18). Muktamar II, diselenggarakan pada tahun 1934, membahas propaganda penyebarluasan dan pengajaran, dan memberi wewenang kepada sebuah perusahaan kecil untuk mendirikan lembaga penerbitan Ikhwanul Muslimin (Mitchell, 1968, p. 19). Muktamar IV diselenggarakan untuk memperingati penobatan raja Faruq pada tahun 1937.

Adapun Muktamar III dan V yang diselenggarakan pada bulan Maret 1935 dan Januari 1939 merupakan pertemuan penting keorganisasian. Muktamar III, Maret 1935, diselenggarakan sebagai respons langsung terhadap pertumbuhan jumlah anggota, membahas tentang seperti apa kriteria

(syarat) dan tanggung jawab keanggotaan, dan hirarkhi dan struktur organisasi gerakan keagamaan. Lebih khusus lagi, Mukhtamar ini mengesahkan aturan pembentukan kepanduan (*jawwalah*) yang secara berkala mengembangkan pendidikan dan pelatihan olah raga dimulai sejak hari-hari pertama gerakan ini di Ismailiyah. Setelah pembentukan kepanduan Ikhwan, pada tahun 1937 dibentuk pula sistem batalion (*katâ'ib*), juga dengan tujuan menempa innerloyalitas dalam gerakan Ikhwan dan menyediakan instrumen-instrumen guna melaksanakan gagasan ikhwan. Mukhtamar V, Januari 1939, memberi perhatian terhadap pertanyaan tentang orientasi formasi internal. Al-Banna melukiskannya sebagai tahapan kedua Ikhwan, yaitu tahapan pembentukan, seleksi dan persiapan. Mukhtamar ini diadakan juga dalam rangka memperingati diesnatalis Ikhwan yang ke-10. Dalam momentum ini dibahas materi tentang pondasi ideologi Ikhwan dan substansi gerakan keagamaan ini untuk sepuluh tahun mendatang (Hasan Al-Banna, 1986, pp. 152–155).

Dalam rangka kerja ini, al-Banna menjelaskan kepada para anggota wilayah gerakan di mana mereka menjadi bagian: Gagasan Ikhwan mencakup semua kategori reformasi, dalam terma yang khusus, al-Banna mendefinisikan gerakan Ikhwan sebagai pembawa pesan Salafiyah, jalan Sunni, keberanian Sufi, organisasi politik, kelompok olah raga, persatuan kebudayaan- pendidikan, perusahaan ekonomi, dan ide-ide sosial. Diantara prinsip-prinsip Ikhwan yang menonjol adalah menghindari segala bentuk perdebatan doktrinal, tokoh terkemuka dan nama, dan partai atau kelompok; ia hanya konsern pada organisasi, program dan aksi; dan perhatian yang terus menerus terhadap perkembangan yang berkelanjutan. Lebih lanjut al-Banna menegaskan sikap gerakan terhadap kekuasaan dan pemerintah, konstitusi, hukum, nasionalisme dan arabisme (Mitchell, 1968, p. 22).

Al-Banna telah menjadikan masalah ini sebagai prinsip dasar Ikhwan untuk menghindarkan diri dari konflik, baik internal maupun eksternal. Menurutnya, ketika berhadapan dengan mereka yang gelisah dan tidak sabar, bahwa kesuksesan hanya dapat diraih dengan kesabaran dan perencanaan yang matang. Aksi bukan kata-kata, persiapan bukan slogan, untuk menjamin tercapainya sebuah kemenangan. Sebuah statemen singkat disampaikan di hadapan para Ikhwan dalam risalah yang terkenal:

“Ketika kalian sudah memiliki 300 batalion, dan telah siap secara spiritual dengan keimanan dan akidah, secara intelektual dengan ilmu dan peradaban, secara fisik dengan aneka latihan dan olah raga. Saat itu kalian mengajakku untuk menyelami kedalaman laut, menerobos awan di langit, dan memerangi setiap tirani yang beringas. Insya Allah aku akan datang bersama kalian”.

Dalam sebuah kasus misalnya, hubungan baiknya dengan Ali Mahir yang diyakini secara luas telah menyalurkan sejumlah bantuan dana gerakan Ikhwanul Muslimin mendorong kelompok pembelot untuk menuntut pemecatan Ahmad al-Sukkari, yang belum lama tinggal di Kairo dan berperan sebagai deputy al-Banna. Sukkari, yang dianggap sebagai fokus permasalahan hubungan dengan Mahir, telah berperan sebagai penghubung tidak resmi antara kedua tokoh ini.

Sekalipun bisa diredam untuk sementara waktu, masalah ini tidak pernah benar-benar terselesaikan. Beberapa anggota memahami komitmen ini secara harfiah, didorong oleh penekanan Ikhwan dalam kedisiplinan dan pelatihan, baik fisik, spiritual maupun moral. Seiring dengan semakin kuatnya gerakan Ikhwanul Muslimin, dan melembagakan kekuatan itu dalam sistem kepaduan dan batalion Ikhwan, beberapa anggota cenderung menuntut untuk segera direalisasikan misi Ikhwan. Antara tahun 1937 sampai dengan 1939, beberapa anggota Ikhwan satu persatu keluar dari organisasi ini karena sikap tidak puas terhadap sikap al-Banna dalam masalah ini, ada yang melihatnya sebagai ketidakkonsistenan al-Banna dengan ajaran Ikhwan. Bahkan seorang diantara mereka ada yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Hasan al-Banna. Pada tahun 1939

kemarahan yang memuncak terhadap politik dan penggunaan dana Ikhwan baik di Mesir maupun di Palestina, dan penolakan al-Banna yang berkelanjutan untuk mendukung penggunaan kekuatan dalam reformasi membuahkan gerakan pemisahan diri dari Ikhwan. Sikap puritan yang kaku dari kelompok baru yang memisahkan diri adalah Jumiyat Syabab Sayyidina Muhammad. Kenyataannya masalah ini masih tetap menggajal sehingga muncul kembali pada tahun 1940, yang menyebabkan gelombang penyeberangan yang lebih besar menuju kelompok yang lebih baru. Yang paling menonjol dari gelombang penyeberangan ini adalah penyeberangan Mahmud Abu Zaid, editor Majalah al-Nadzir yang mengambil alih majalah dan izin penerbitan majalah tersebut. Meskipun cukup signifikan, dan merepotkan al-Banna, pembelotan yang terjadi pada tahun 1939 dan problem yang ditimbulkannya, sama sekali tidak memperlambat kemajuan Ikhwanul Muslimin, baik dilihat dari jumlah anggota maupun pengaruhnya di masyarakat. Kecenderungan pemikiran ataupun struktur gerakan ini masih terpendam selama sepuluh tahun pertama, kehidupan Ikhwan mulai menampakkan diri dan mengambil bentuk yang pasti. Hampir tidak terasa, di tengah-tengah rasa putus asa dengan kekacauan pada tahun-tahun ini, Ikhwan berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu memainkan peranan dalam kehidupan pasca perang di Mesir.

Pemikiran Ikhwanul Muslimin dan “Radikalisme Islam”

Pemikiran IM sesungguhnya sangat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Namun di tengah dinamika tersebut terdapat hal yang tak berubah hingga kini. IM mengambil pemikiran aliran kaum salafiah yang menekankan pentingnya kembali kepada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunah, serta menjaga diri dari setiap apa pun bentuk kemusyrikan demi mencapai kesempurnaan tauhid. Kehidupan umat Islam harus diupayakan zaman ideal yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya (salaf al-salih). Aliran pemikiran dakwah pergerakan mereka terpengaruh oleh gerakan dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahhab, gerakan dakwah Sanusiah, dan gerakan dakwah Sayid Rasyid Ridha. Tetapi dalam banyak hal, gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran Ibnu Taimiyah yang wafat pada 728 H/ 1328 M, yang berafiliasi ke mazhab Ahmad bin Hanbal (Rahmat, 2002, p. 35).

Sebagai organisai, pemikiran IM terbentuk dari interaksi, dialog dan pergumulan pemikiran tokoh-tokohnya. Tetapi, Pemikiran IM sangat terpengaruh oleh dua tokoh besarnya; Hasan Al-Banna sebagai pendiri IM dan Sayyid Qutb sebagai ideolog IM. Al-Banna sebagai motor penggerak organisasi lebih banyak meletakkan dasardasar manhaj dakwah IM. Dokumen-dokumen resmi, seperti AD/ART IM pada masa-masa awal adalah buah tangan Al-Banna. Ia juga menulis risalah tentang pergerakan yang juga menjadi acuan para aktifis IM. Sementara Qutb memberikan konsep yang relatif lengkap dan utuh dari filosofi, ideologi hingga metode perjuangan. Qutb bisa dibilang menyempurnakan bangunan dasar yang telah diletakkan Al-Banna, meskipun banyak pemikiran Al-Banna yang ditarik ke kutub ekstrim oleh Qutb, sehingga banyak metode gerakannya yang berseberangan dengan Al-Banna (Rahmat, 2002, pp. 36–37).

Secara umum, pemikiran IM dibangun berdasarkan premis awal bahwa Islam merupakan agama syumul, yang meliputi segala segi kehidupan. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya berkenaan dengan ibadat ritual dan urusan-urusan privat semata. Tetapi ia juga menyangkut kehidupan publik umat Islam. Dalam sebuah makalah yang dimuat koran Ikhwan, Al-Banna mengatakan, bahwa tidaklah sempurna keislaman seorang muslim yang mengabaikan kondisi umat yang rusak dengan menyibukan diri dengan ibadah (Mahmud, 1997, p. 23). Dalam risalah lain Al-Banna mengatakan, bahwa syarat kesempurnaan Islam seseorang adalah keterlibatannya dalam aktivitas politik. Dengan

demikian Al-Qur'an dan Sunah harus dijadikan landasan bagi setiap aktivitas hidup, baik sosial, ekonomi, budaya dan politik. Maka Islam mesti mewarnai seluruh bangunan sistem hidup umat Islam. Oleh karena itu, bagi IM, dakwah Islam harus menjangkau seluruh aspek kehidupan dan tidak boleh meninggalkan satu aspek pun. Segala sistem yang tidak Islami akan menjadi target dakwah IM. Maka segala upaya untuk menjauhkan atau memisahkan Islam dari salah satu aspek kehidupan umat, akan ditentang oleh IM. Oleh karena itu, gagasan sekularisasi menjadi salah satu musuh utama IM. Berdasarkan pemikiran di atas, maka bagi IM Islam adalah agama dan negara (*din wa dawlah*) sekaligus. Islam memiliki konsep sosial dan politik tersendiri yang harus ditegakkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, selain masyarakat, negara juga harus diislamkan. Untuk itu, segala pemikiran, ideologi, nilai-nilai dan tindakan kolektif harus bersumber dari Islam. Demikian juga dengan sistem kenegaraan, harus menempatkan Islam sebagai sumber satusatunya. Syariat Islam harus mengatur perilaku politik, sistem dan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, syiar Islam akan menjadi luas dan negara akan menjadi kuat serta mampu menjamin kehidupan ideal bagi warga negara (V, 2013, p. 65).

Sebagai perwujudan dari pemikiran di atas, IM menetapkan, bahwa prioritas jenjang tugas yang diharapkan dari anggota Ikhwan adalah, *pertama*, memperbaiki diri pribadi (*islah an nafs*), ini merupakan upaya islamisasi pribadi sebagai unsur terkecil dari masyarakat. *Kedua*, membentuk rumah tangga Islami (*islah al bait al-muslim*), sebab pembangunan masyarakat yang Islami mesti dimulai dari keluarga. *Ketiga*, perbaikan masyarakat (*islah al mujtama'*), agar tercipta situasi kondusif bagi berkembangnya kehidupan yang Islami. *Keempat*, membebaskan bangsa (*tahrir alwatan*), yaitu pembebasan bangsa dari segala bentuk penjajahan kekuasaan asing non-Islam dalam segala aspeknya. *Kelima*, memperbaiki pemerintahan (*islah al-hukumah*), yaitu dengan melakukan perubahan ke arah yang Islami. *Keenam*, mengembalikan kejayaan umat Islam di kancah internasional dengan cara membebaskan negara-negara muslim dan membangun kehidupan mereka. *Ketujuh*, melakukan dakwah ke seluruh dunia dalam rangka memberantas kesesatan.

Setelah mengalami tekanan politik tahun 1949, 1954-1955 dan 1965, terjadi perkembangan yang signifikan dalam pemikiran dan gerakan Ikhwan. Dalam diri IM mulai berkembang dua kecenderungan, yaitu aliran moderat yang banyak mengacu ke pendiri pertama Hasan Al-Banna dan aliran radikal yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Al-Banna selalu bersikap tegas bahwa ia tidak memiliki niat untuk melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan. Tujuan utama IM adalah pendidikan. Dia percaya bahwa jika masyarakat telah menyerap risalah Islam dan membiarkannya mengubah mereka, maka Mesir akan menjadi Negara Islami, tanpa perlu adanya pengambil alihan secara paksa (Karen Armstrong, 2001, pp. 349-350).

Namun perlu digaris bawahi, bahwa substansi pemikiran dan agenda akhir dua kelompok ini tetap sama, yakni mewujudkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Aliran pertama menganut strategi gradualis, dengan menunda setiap konfrontasi dengan negara, hingga keanggotaan dan kekuatan kelompok itu benar-benar menjamin kekuatannya. Hal ini sering disebut dengan strategi *taqiyyah* (penyamaran). Kelompok kedua lebih percaya kepada tindakan radikal seketika terhadap pemerintah yang ada. Mereka lebih senang beraksi secara langsung dan unsur-unsur militannya menjadi lebih menonjol (T. Shireen Hunter, 2001, pp. 16 & 18). Berangkat dari penilaian terhadap kelompok kedua inilah kemudian dikait-kaitkan dengan sosok Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin dalam hal pembentukan, radikalisme Islam.

Senada dengan hal di atas, Fathi Yakan mengungkapkan, bahwa dalam tubuh IM terdapat perpecahan berbagai aliran pemikiran dan gerakan yang disebabkan tidak adanya kesinambungan, upaya mengasimilasi, mengkristalkan diri dengan pemikiran dan prinsip-prinsip Al-Banna sebagai pendiri IM, dan tidak adanya keterbukaan untuk mengakomodasi aspek positif dari orang lain.

Yakan menyebutkan, ada beberapa aliran: Aliran Sayyid Qutb (*al-madrasah al-qutbiyyah*), aliran Hasan Al-Turabi (*al-madrasah al-turabiyyah*), aliran Pengkafiran dan Hijrah (*al-madrasah al-takfir wa al-hijrah*), aliran Front Pembebasan Islam (*al-madrasah al-jabhah alislamiyyah*), aliran Jama'ah Islamiyah Bersenjata (*al-jama'ah alislamiyyah al-musallahah*), dan aliran-aliran lain yang lahir dari keluarga besar IM (Dimitri, 1993, pp. 184–189).

Aliran-aliran tersebut dianggap cenderung bersifat radikal, yang suka memakai cara-cara kekerasan dan konfrontasi. Hal ini dinilai Yakan sebagai inkonsistensi dari garis-garis besar pemikiran dan prinsip-prinsip IM pada masa awal, sebagaimana dicanangkan oleh Al-Banna.

Ikhwanul Muslimin: Cikal Bakal Berdirinya Hamas

HAMAS (*Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyyah*) bukanlah sebuah gerakan yang baru muncul pada saat didirikannya pada tanggal 14 Desember 1987. HAMAS adalah metamorfosis dari gerakan yang telah dilakukan sejak 1930-an oleh Ikhwanul Muslimin di Palestina (Bachtiar, 2006, p. 83). Ikhwanul Muslimin sendiri adalah pelopor gerakan Islam modern yang didirikan oleh Hasan Al-Banna sejak awal abad 20 M di Mesir yang kemudian berkembang menjadi gerakan Islam terbesar saat ini, dengan cabang gerakan di lebih dari 70 negara di lima benua (Siddiq, 2003, p. 1).

Pasca berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1948, muncul gerakan-gerakan perlawanan yang berjuang melawan Israel dipimpin oleh Negara-negara Arab. Ini berlangsung antara tahun 1948 sampai tahun 1967. Kekalahan yang berturut-turut yang dialami dalam perjuangan di bawah kepemimpinan Negara-negara Arab menyebabkan estafet kepemimpinan berpindah ke tangan bangsa Palestina sendiri. Seiring hal tersebut, mulai bermunculanlah gerakan-gerakan perlawanan rakyat Palestina dari berbagai kelompok di Palestina. Beragamnya gerakan tersebut disebabkan masing-masing kelompok memiliki perbedaan ideologi atau pemahaman dalam memandang permasalahan Palestina. Ada kelompok yang moderat dan cenderung kompromistis yang lebih memilih untuk berunding dengan Israel dan semua pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah Israel-Palestina.

FATAH adalah salah satu faksi yang masuk dalam kelompok ini. Ada pula kelompok yang sama sekali tidak mau berkompromi dengan Israel. Perginya Israel dari Palestina adalah harga yang tidak dapat ditawar lagi. Kelompok ini lebih memilih untuk berjuang dengan senjata dibandingkan melalui meja perundingan. Hal ini bukannya tanpa alasan, mereka melakukan hal tersebut karena diplomasi dalam pandangan mereka hanya akan membuat Israel akan semakin semena-mena dalam menduduki tanah Palestina. Hal ini terbukti pada akhirnya di mana Palestina hanya tersisa Jalur Gaza dan Tepi Barat. Ikhwanul Muslimin cabang Palestina yang kemudian bermetamorfosis menjadi HAMAS adalah salah satu yang termasuk dalam kelompok ini (Bachtiar, 2006, pp. 63–64). Ikhwanul Muslimin memperlihatkan perhatian yang serius semenjak terjadinya gejolak di Palestina akibat jatuhnya Palestina ke tangan Inggris dan eksodusnya Bangsa Yahudi dari Eropa ke kawasan ini.

Tahun 1935 Hasan Al-Banna mengutus saudaranya, Abdurrahman Al-Banna, dan Muhammad As'ad Al-Hakim untuk mengunjungi Palestina dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan di sana. Kemudian tahun 1936 Ikhwanul Muslimin mendirikan cabang di Haifa. Sampai tahun 1948 jumlah anggota berkisar antara 12 sampai 20 ribu orang yang semuanya tunduk di bawah kendali Ikhwanul Muslimin pusat di Kairo (Bachtiar, 2006, pp. 69–70). Ketika terjadi pembunuhan terhadap Perdana Menteri Mesir, Muhammad Fahmi Naqrasyi, pada tanggal 8 November 1948, Ikhwanul Muslimin dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa

tersebut. Akibatnya, Ikhwanul Muslimin dan cabang-cabangnya dibekukan, termasuk Ikhwanul Muslimin cabang Palestina.

Ikhwanul Muslimin cabang Palestina kemudian mengganti nama gerakannya dengan nama "*Jam'iyyah Al Tauhid*". Semenjak tahun 1968-an mereka mulai melakukan aktivitas dakwah, sosial dan pendidikan. Gerakan ini lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan kader-kader Palestina di masa yang akan datang yang memiliki keyakinan tauhid yang kuat. Mereka bergabung dengan FATAH dalam militer dan politik hanya sampai tahun 1970-an karena berbagai ketidakcocokan di antara keduanya. Setelah itu "*Jam'iyyah Al-Tauhid*" tidak melakukan aktivitas militer dan politik dan kembali kepada aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya. Tahun 1970an mulai terlihat kader-kader muda yang memiliki berbagai disiplin ilmu karena mereka mulai banyak yang menuntut ilmu di berbagai universitas (Bachtiar, 2006, pp. 71-74).

Dari sinilah kemudian muncul kader-kader muda baru yang cerdas-cerdas. Diantara mereka ada yang berhasil menjadi dokter, insinyur, dan ilmuwan di disiplin ilmu lain. Berkat para kader muda inilah kemudian berhasil didirikan Universitas Gaza pada tahun 1978. Tahun 1980-an, melalui strategi barunya itu, gerakan ini yang disokong oleh kader-kader mudanya yang tangguh, berkomitmen tinggi, dan cerdas, dimulailah era baru perjuangan di Palestina. Tidak hanya dengan perjuangan bersenjata, namun gerakan sosial dan pendidikan yang bisa menyelamatkan bangsa Palestina dari keterpurukan dan kebodohan juga dilakukan. Sampai ketika Ikhwanul Muslimin memutuskan untuk mengubah namanya menjadi HAMAS, gerakan ini lebih siap secara SDM (Sumber Daya Manusia) dari berbagai sektor hingga sangat memengaruhi gerakan HAMAS pada masa-masa berikutnya (Bachtiar, 2006, pp. 71-74).

HAMAS Sebagai Gerakan Sosial (1967-1981)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berdirinya HAMAS. *Pertama*, penolakan bangsa Palestina terhadap Israel. Bangsa Israel di mata bangsa Palestina adalah seperti layaknya turis yang berkunjung ke Palestina yang suatu saat harus kembali ke negara asalnya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh bangsa Israel, bahkan mereka malah menetap secara permanen dan mendirikan negara di Palestina. Jelas hal ini menimbulkan penolakan dari bangsa Palestina. Hal ini sama dengan sebuah penjajahan terhadap bangsa Palestina. Berdirinya Negara Israel juga dianggap sebagai bentuk eksistensi imperialisme Barat. Sampai tahun 1967 hampir tidak mungkin menggunakan kata Israel dalam tulisan Arab. Selain pemboikotan, penolakan terhadap Israel juga ditandai dengan bermunculannya gerakan-gerakan anti Israel seperti PLO, Jihad Islami dan lain-lain (Fauzi, 1995, p. 31).

Kedua, kebijakan-kebijakan diskriminatif Israel (Baskara, 2009, p. 135). Israel mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap bangsa Palestina. Hal ini menyebabkan Palestina banyak tertinggal dalam berbagai segi kehidupan baik pendidikan, sosial dan ekonomi. Bangsa Palestina menjadi warga negara kelas dua karena minimnya fasilitas hidup yang diperoleh dan ditambah lagi menjadi korban atas kebijakan sewenang-wenang Israel. Bangsa Palestina menjadi budak di negerinya sendiri. Mereka dijadikan buruh pembangunan proyek-proyek pembangunan Israel dengan upah sangat murah. Salah satu contoh gambaran tentang buruknya kondisi kehidupan bangsa Palestina pasca penjajahan Israel adalah apa yang terjadi di kamp Jabalia, seperti yang disampaikan oleh Edward W. Said: "Jabalia merupakan kamp paling mengerikan yang pernah saya lihat. Anak-anak berkerumun di jalanan tak beraspal. Tak ada sistem pembuangan kotoran.

Bau busuk yang memualkan memenuhi udara. Kemana pun memandang terlihat orang-orang berpakaian compang-camping berdesak-desakan. Begitu padatnya sehingga sulit mencari

jalan di antara orang-orang itu. Statistik yang ada hampir merupakan mimpi buruk: angka kematian bayi dan tingkat pengangguran sangat tinggi, penghasilan terendah di seluruh wilayah pendudukan, pemberlakuan jam malam setiap hari, kurangnya pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Rumah-rumah kecil kumuh terbuat dari papan, tanah liat dan timah. Berjejal jejal seperti tumpukan kotak. Tak ada tanah lapang atau hamparan padang di sini (Amr, 1993).

Perubahan-perubahan fisik di luar bangunan, upaya pembuatan sistem pembuangan yang lebih baik atau menambah bagian rumah sama sekali dilarang. Saya tak mendengar satu hal pun yang menumbuhkan harapan selama dua jam pertemuan dengan orang-orang Jabalia. Salah seorang dari mereka bercerita pernah dipenjara selama tujuh belas tahun, tentang anak-anak mereka yang sakit, dan tentang kemelaratan.

Ketiga, Ketidakpuasan terhadap PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). PLO dianggap semakin tak berdaya menghadapi tekanan Israel. PLO yang semula menempuh jalan bersenjata mengubah metode perjuangannya menjadi jalan damai, yaitu melalui meja perundingan. Hal ini terbukti tidak efektif, karena Israel berkali-kali melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan membuat kedudukan bangsa Palestina semakin tersudut. Para pemimpin PLO pun mulai saling berebut posisi dalam pemerintahan. Korupsi semakin merajalela. Hal ini menyebabkan penderitaan bangsa Palestina akibat kebiadaban Israel semakin terabaikan (Bachtiar, 2006, p. 91). Selain itu, PLO dan HAMAS memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pertama, aspek ideologi. Ideologi PLO yang ditempuh adalah jalan sekuler, bergerak antara siklus nasionalisme, kebangsaan, dan kekirian.

Sementara HAMAS memandang rakyat Palestina menghendaki Islam yang mereka anggap lebih berkemampuan untuk membangkitkan potensi-potensi umat, menyatukan dan merekrutnya melawan Zionisme dan para sekutunya. Kedua, metode perjuangan. Cara dan pendekatan PLO yang pragmatis yang terus diimplementasi untuk merespon tekanan-tekanan Barat dan “tuntutan-tuntutan waktu”, upaya untuk tetap eksis atas ideologi sekuler, walaupun harus mengorbankan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan hak-hak fundamental rakyat Palestina. Hal ini yang lambat laun harus mengkerdalkan tuntutan politis bangsa Palestina. Maka, dari upaya untuk memerdekakan Palestina dan mengusir penjajah Zionis berubah menjadi upaya demokratis yang mencakup bangsa Arab dan Zionis. Bahkan, menerima “hak” Zionis untuk menduduki 77% wilayah Palestina. Kemudian menyepakati pemerintahan otonom di wilayah Tepi Barat dan Gaza. Sementara HAMAS sebagai gerakan masih terus merepresentasikan kekuatan perjuangan Palestina yang paling penting dan terus berjuang dengan senjata dan menganulir kompromi dari tanah Palestina walau sejenak (Yusuf, 2004, p. 48).

HAMAS sebagai sebuah gerakan sosial memiliki dua tahapan. Fase pertama (1967-1976). Fase ini bertujuan untuk mempersiapkan tiang penyangga perjuangan. Perang enam hari antara Arab-Israel (1967) telah mengubah peta kekuasaan Israel. Melalui Perang enam hari, Israel dapat menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Semenanjung Sinai. Sejak saat itu, bangsa Palestina dituntut secara mandiri memperjuangkan kemerdekaannya dan menuntut dikembalikannya seluruh wilayah teritorial Palestina, terutama Tepi Barat dan Jalur Gaza (Noer, 2009, p. 41). Pada 6-26 Oktober 1973, perang kembali berkecamuk di Timur Tengah. Perang yang dikenal dengan nama Yom Kippur itu melibatkan gabungan militer Suriah dan Mesir menghadapi Israel. Perang ini menimbulkan akibat yang sangat signifikan, yaitu banyaknya tentara Israel yang tewas sebanyak 2.656 orang dan pesawat yang tertembak jatuh sampai 102 buah. Mesir dan Suriah bahkan berhasil merusak 1000 tank Israel (NN, 2007, pp. 6-17).

Tak hanya itu, PLO juga mulai berani melakukan perlawanan terhadap Israel. Sikap keras PLO tersebut terutama disebabkan kian merajalelanya pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang tak berdosa. Israel menyambut perlawanan PLO dengan menginvasi

Libanon, yang ketika itu menjadi markas PLO. Perang pun tak dapat dihindarkan. Dalam situasi seperti itu, Ikhwanul Muslimin, yang sejak tahun 1967 telah menggabungkan diri dengan PLO, juga ikut ambil bagian dalam berbagai konflik dengan Israel. Namun, Ikhwanul Muslimin tidak sepenuhnya terjun dalam pertempuran terbuka. Hal itu dikarenakan Ikhwanul Muslimin lebih memilih untuk berfokus melakukan perubahan-perubahan mendasar di masyarakat. Asumsi mereka, perubahan masyarakat akan membawa pada perubahan politik. Masyarakat harus disiapkan dari berbagai aspek agar siap untuk merdeka sepenuhnya. Oleh karena itu, Ikhwanul Muslimin kemudian mulai meluaskan gerakannya ke berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Singkatnya, fase ini bercirikan mundurnya Ikhwanul Muslimin Palestina dari aktivitas militer dan politik. Mereka fokus pada kegiatan-kegiatan dakwah, sosial dan pendidikan. Pada fase ini, urusan politik dan militer dipercayakan di bawah kendali FATAH, yaitu dengan mendirikan sayap militer lokal di Pegunungan Al-Joun dan Lembah Yordan yang diberi nama Shaiks antara tahun 1967-1970.

Ikhwanul Muslimin dan Kiprahnya dalam Pembebasan Palestina

Telah penulis jelaskan di atas bahwa IM sebagai gerakan keagamaan diterima baik tak hanya oleh masyarakat Mesir, juga penduduk dunia. Hal itu tidak berlebihan karena dibuktikan dengan berbagai organisasi lain di luar daerah yang menginduk atau terinspirasi oleh IM. Cita-cita IM untuk mengembalikan supremasi Islam mendapatkan sambutan hangat dari kaum muslimin. Maka dari itu, dukungan rakyat Mesir kepada IM begitu luar biasa sebab sebagian besar rakyat Mesir adalah umat Islam. Sedangkan Islam sendiri memiliki peran besar dalam politik luar negeri termasuk keterlibatan pergerakan Islam dan ulama dalam memberikan legitimasi dalam politik (Dhani, n.d.).

Dengan berkembangnya Islam di Mesir sekaligus dukungan kuat rakyat yang notabene muslim kepada IM membuat para pembuat kebijakan menyesuaikan demi terciptanya akuntabilitas yang sesuai dengan parameter hasil dari perubahan sosial. Termasuk yang terpenting dukungan massa umat Islam yang dominan dan besar. Hal ini membuat IM menjadi kelompok berpengaruh pada politik luar negeri Mesir. Pengaruh ini berkaitan dengan konstitusi, kondisi domestik, dinamika politik, dan tentunya faktor kepemimpinan.

Sebagai gerakan yang memiliki kekuatan massa yang massif IM bertransformasi menjadi sebuah kekuatan politik tidak resmi yang berada dalam pemerintahan namun berpengaruh dalam politik Mesir. Sebagai gerakan keagamaan IM sangat memperhatikan politik Mesir yang dekat dengan negara-negara Barat. Hal inilah yang kemudian menginisiasi IM untuk memfokuskan politik Mesir kedalam tiga formulasi negara Islam. Pertama adalah implementasi Islam sebagai sistem total bagi negara, negara bersatu dengan ajaran Islam sepenuhnya dan juga menggunakan segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah cita-cita pertama yang dicetuskan oleh Hasan Al-Banna. IM juga lahir karena ingin mengembalikan kejayaan Islam setelah runtuhnya kekhalifahan di Turki (NN, 1981, p. 12).

Kedua, implementasi Al Qur'an dan Sunnah atau Hadist Rasulullah SAW sebagai landasan hukum dan landasan idiil yang penerapan dan komprehensif. Ketiga, IM yakin bahwa Islam berlaku di setiap waktu dan segala tempat. Sehingga IM masih memercayai bahwa Islam adalah solusi dari segala permasalahan dan masih bisa digunakan hingga akhir zaman. Contoh campur tangan IM yang paling kentara dalam politik luar negeri Mesir adalah soal dukungan Mesir untuk kemerdekaan Indonesia. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Dukungan resmi ini muncul setelah adanya desakan IM pada saat itu. Atas desakan itulah akhirnya Mesir berani mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian soal Palestina, dinamika

politik di Palestina telah didominasi oleh satu aktor selama 30 tahun terakhir, yakni Ikhwanul Muslimin.

Sekali lagi, karena itulah IM berperan aktif dalam permasalahan Palestina ini. Ikhwanul Muslimin pertama kali mendirikan perwakilannya di Jerusalem pada 1935. Hasan Al-Banna langsung mengirimkan saudara laki-lakinya Abd Al Rahman Al Banna untuk membangun jaringan dan sel-sel Ikhwanul Muslimin di Palestina pada tahun itu. Dari perjalanan Abd Al Rahman Al Banna ini, Hassan Al-Banna mampu mendirikan perwakilan organisasinya di Jerusalem dan menyebar hingga ke kota-kota penting di Palestina. Keanggotaan IM di Palestina mencapai 12.000 hingga 20000 orang. Telah kita bahas di awal bahwa Yahudi sejak 12 Juni 1895 sudah mempunyai program pengusiran penduduk Arab-Palestina. Dua sasaran bersifat komplementer dan mutlak yang mereka canangkan adalah mendapatkan sebuah tanah air dan menggantikan penduduk mayoritas Arab-Palestina baik dengan cara tidak mengakui hak-hak mereka, mengatasi jumlah mereka atau mengusir mereka dengan cara apapun (Yaquub, 2015, p. 6).

Dapat disimpulkan bahwa dua sasaran itu sejak dicanangkan gagasan Zionisme oleh Theodore Herzl terus berjalan hingga diproklamasikan negara Israel pada 14 Mei 1948 oleh David Ben Gurion. Bahkan hal itu tetap berjalan hingga detik ini. Perang Arab-Israel pecah ketika terbentuk negara Israel. IM yang telah mempunyai basis di Palestina mempunyai peran penting. Awal 1950-an IM Palestina mengorganisasi aksi-aksi gerilya mewakili Mesir dalam melawan Israel. Walaupun mereka berseberangan dengan pemerintah Mesir saat itu, IM tetap bersikukuh andil dalam militer Mesir melawan Israel (Avias, n.d., p. 100).

Perlu kita ketahui bahwa pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser, IM diberangus pada 1954. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya IM dan Gamal Abdul Nasser mempunyai hubungan baik. IM bekerja sama dengan elemen Free Officers (Nasser termasuk di dalamnya) untuk melakukan revolusi Mesir pada 1952. Bahkan dalam perang Palestina, hubungan antara Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan Free Officer (FO) berkaitan dengan suplai persenjataan dan pelatihan militer untuk para sukarelawan (Baskara, 2009, p. 135).

Pertanyaan yang sering diajukan adalah mengapa IM mau bergabung dengan FO untuk melakukan revolusi? Dr. Muhammad Sayid Al Wakil menganalisa enam faktor yang menyebabkan IM mendukung revolusi ini, yaitu: Pertama, Raja Farouk mengangkat administrasi kolonial Inggris dalam pemerintahan Mesir. Kedua, membekali pasukan mujahidin Mesir untuk Palestina dengan senjata yang rusak. Ketiga, Mengadakan perjanjian damai dengan Israel dan menarik mundur pasukan Mesir dari Palestina. Keempat, selama masa pemerintahannya menyebarkan pengaruh negatif kebudayaan Barat dan kerusakan moral. Kelima, Raja Farouk terlibat dalam skandal-skandal seks dan moralitas. Keenam, dianggap terlibat dan bertanggung jawab pada peristiwa pembunuhan pendiri IM, Hasan Al-Banna.

Alasan yang paling kuat hingga mendorong IM ikut andil dalam revolusi adalah Kekuasaan monarki absolut Raja Farouk hanya menjadi pemerintahan boneka yang selalu melindungi kekuasaan kolonial Inggris yang telah lama berada di Mesir. Raja Farouk tidak bisa bersikap tegas pada pendudukan asing pasukan Inggris yang masih bercokol di Zona Terusan Suez. Selama hubungan baik antara IM dan FO, perjuangan di Palestina begitu lancar dalam segala hal baik logistik maupun persenjataan. Namun, FO yang akhirnya bertransformasi menjadi Dewan Revolusi untuk memerintah Mesir merasa bahwa IM akan menjadi faktor ancaman yang berpotensi menjadi oposisi politik.

Pada titik inilah hubungan Ikhwan dengan Dewan Militer akhirnya memburuk. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tekanan dari pihak militer dan berujung kepada pemberangusan gerakan IM oleh rezim militer. Dewan Revolusi yang saat itu dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser

menghancurkan IM sampai tingkat yang tidak terbayangkan. Di sini kita tidak akan membahas lebih jauh bagaimana pengkhianatan rezim militer Mesir dalam menumpas IM. Yang patut digaris bawahi adalah walaupun IM telah dilarang di Mesir, para anggota IM tetap bisa bergerak walaupun di bawah tanah. Selama Mesir berada di bawah pemerintahan militer, perjuangan Ikhwanul Muslimin terhadap Palestina tidak pernah surut. Namun perjuangan tersebut tetap memiliki kendala dalam soal gerakan yang tidak begitu bebas. Selain dalam hal militer, IM juga gencar membuka kerjasama dengan negara lain terutama Yordania.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah penguasaan Tepi Barat tanpa ada konflik dan pertumpahan darah dengan tujuan memberikan eksistensi pada usaha pembentukan negara Palestina. Pada akhirnya aktivitas Ikhwanul Muslimin di Tepi Barat tidak mengedepankan politik melainkan lebih kepada aktivitas sosial dan religius. Pada 1948 wilayah Palestina sebagian besar hilang dan digantinya teritori Palestina di bawah Yordania dan Mesir telah meningkatkan pengaruh IM di Palestina, membentuk perkembangannya dan menghubungkannya dengan dunia Arab (Banna, 2005, p. 35).

Di Tepi Barat, IM yang ada di sana bergabung dengan komunitas IM yang ada di Yordania secara keseluruhan. Kenyataan menunjukkan bahwa antara tahun 1948 dan 1967, IM adalah satu-satunya organisasi politik yang tetap bertahan di Tepi Barat. Walaupun gerakan IM yang berkembang di Tepi Barat kurang memiliki tradisi militan yang kuat. Sementara itu, IM yang ada di Gaza lebih militan, mereka menghadapi kenyataan yang berbeda dengan saudaranya di Tepi Barat. Beberapa tahun berikutnya, IM telah menjadi pergerakan politik yang paling terkenal di Gaza. Jumlah anggotanya ribuan, sebagian besar mereka berprofesi sebagai mahasiswa dari kamp-kamp pengungsian. Sebagaimana ciri khas IM pada umumnya, di Gaza mereka menunjukkan tindakan politik konfrontasi dan tindakan bersenjata dengan pemerintah yang tidak islami. Memasuki tahun 1950-an, IM keluar dari panggung politik dan lebih fokus pada perbaikan masyarakat. Mereka kemudian menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda. Perang 1967 juga tidak mengubah pemikiran Ikhwanul Muslimin namun sedikit menambah semangatnya. Pada perang Arab Israel 1967 ini Syaikh Abdullah Azzam rahimahullah sebagai salah seorang anggota IM Mesir hijrah ke Palestina dan bergabung dengan anggota IM lainnya untuk berjihad melawan Israel.

Kekalahan pada perang 1967 telah membangkitkan pergerakan Islam di sisi lain dan ini berdampak pada perkembangan IM sebagai sebuah pergerakan Islam dari awalnya. Kontak antara IM di Gaza dan di Tepi Barat tetap berlangsung dari tahun 1960-an hingga 70-an walau kedua wilayah tersebut berada di bawah kontrol administrasi Israel.

Syaikh Ahmad Yassin dan HAMAS

Pada 1973, Syaikh Ahmad Yassin seorang tokoh kharismatik HAMAS di masa depan mendirikan sebuah organisasi bernama Al-Mujamma Al-Islami. Al-Mujamma adalah sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam kesehatan, bank darah dan kepemudaan. Organisasi ini juga bergerak dalam hal beasiswa bagi para pemuda Palestina yang ingin melanjutkan studi ke Saudi dan Eropa (Rizqa, n.d.).

Kedekatan Ahmad Yassin dan IM menciptakan kerja sama yang baik di antara keduanya. Berdirinya Al-Mujamma dan hadirnya Ahmad Yassin adalah solusi kebuntuan pergerakan IM setelah perang Arab-Israel 1967. IM menggunakan Al-Mujamma sebagai momentum untuk memusatkan reorganisasi kepemimpinan di internal IM. Reorganisasi ini membuat IM menjadi lebih bersatu dan kuat dengan bergabungnya IM di Gaza, Yordania dan Palestina menjadi satu bagian.

IM juga mempergunakan Al Mujamma sebagai kerangka kerja intitusional dalam aktivitas vitalnya. Akhirnya, secara efektif seluruh pergerakan Islam yang terafiliasi dengan IM ada di bawah kendali dan berpusat komando pada Al Mujamma. Reorganisasi ini membuat IM di wilayah pendudukan menjadi lebih birokratis dan terpusat, sehingga segala bentuk bimbingan, intruksi dan dukungan dari IM serta pimpinannya berpusat di Yordania. Sebagaimana komando dari pusat IM Mesir bahwa untuk sementara waktu tidak melakukan konfrontasi bersenjata dengan Israel. Masa-masa tenang ini digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan sembari melakukan perbaikan di internal IM. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemblokiran gerakan Islam oleh Israel (Ferry, 2008, p. 113).

Pergerakan perlawanan IM mulai menggeliat pada periode tahun 1983 hingga 1987 ditandai dengan fase persiapan langsung melawan pendudukan Israel. Hingga akhirnya Hamas terbentuk bersamaan dengan pecahnya Intifadhah pertama pada 8 Desember 1987 di kemah pengungsian Jabalya Gaza yang diawali dengan perundingan antara rakyat Palestina dengan Majelis penguburan korban konflik Palestina-Israel. Babak baru perjuangan IM di Palestina akan dimulai setelah berdirinya Hamas. Tentu banyak sekali peristiwa heroik yang terjadi saat itu.

Simpulan

Sejak berdirinya Ikhwanul Muslimin, peta politik di Mesir memasuki babak baru. Kebijakan para pemimpin yang berkuasa di Mesir mengalami perubahan dan pasang surut, berkaitan interaksinya dengan Ikhwanul Muslimin. Interaksi Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir penulis petakan dalam dua periode, yaitu: pra-revolusi dan pasca-revolusi. Pergulatan Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah Mesir sering diwarnai adanya konspirasi, penindasan, yang kemudian disambut dengan demonstrasi dan persaingan merebut kekuasaan. Pola kerja IM yang mengkombinasikan aktivitas politik dengan kegiatan amal Islam, berhasil membuatnya meraup dukungan luas di dunia Arab, dan menjadi inspirasi bagi kelompok Islam lain seperti Hamas di Palestina yang berdiri pada 1987 setelah Intifada Pertama pecah di Palestina sampai 1991-1993. Pola kerja yang demikian menjadi sebuah paradoks, selain dapat memudahkan memperoleh dukungan tetapi juga dapat membenturkan agama dengan persoalan sosial-politik. Penelitian ini masih memungkinkan untuk ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya dengan menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Abd al-Monein Said Aly and Manfred W. Wenner. (n.d.). Modern Islamic Reform Movements: The Brotherhood in Contemporary Egypt. *Middle East Journal*, Vol. 36, N.
- Abdulah, T. (2002). *Ensiklopedi Tematis Hukum Islam, Dinamika Masa Kini*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Amr, Z. A. (1993). Hamas: A History and Political Background. *Jurnal of Palestine Studies*, Vol.22, No.
- Avias, A. (n.d.). HAMAS dan Proses Perdamaian Israel-Palestina Pasca Pemilu Legislatif di Palestina Tahun 2006. *Jurnal PKTTI*, 100.
- Aziz, J. A. A. (2002). *Zhurûf al-Nasy'ah wa Syakhshiah al-Imâm al-Mu'assis*. Kairo: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyah.
- Bachtiar, T. A. (2006). *Hamas Kenapa Dibenci Amerika?* Jakarta: Hikmah.
- Banna, H. Al. (2005). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin* (1st ed.). Solo: Era Intermedia.
- Banna, H. al-. (1966). *Mudzâkarât al-Da`wah wa al-Dâ`iyah li al-Imâm al-Syahîd Hasan al- Banna*. Kairo: Dâr al-Tauzi' wa al-Nasyr al- Islâmiyah.
- Baskara, N. (2009). *Gerilyawan Militan Islam dari Al-Qaeda, Hizbulah, hingga Hamas*. Yogyakarta: narasi.
- Basyar, M. H. (1988). Bagaimana Militer Menguasai Mesir? *Jurnal Politik*, 3.
- Brooke, R. S. L. & S. (n.d.). The Moderat Muslim Brotherhood. *Foreign Affairs Magazine*.
- Dhani. (n.d.). El_Ashim, <http://www.islamedia.id/2017/08/ikhwanul-muslimin-dan-kiprahnya-dalam-pembebasan-palestina.html>.
- Dimitri, A. (1993). *As-Simat al-Asasiyah li al-Harakah al-Islamiyah fi Misr*. Kairo: Qadayah Fikriyyah.
- Efendi, M. (2001). *Ensiklopedia Agama dan Flisafat*. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Fathi Yakan. (2002). "Revolusi" Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Sayyid Qutb sampai Rasyid Al-Ghannusyî. Bandung: Harakah.
- Fauzi, A. (1995). *Keberadaan Gerakan HAMAS dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina*. Depok: Skripsi Sarjana Universitas Indonesia.
- Ferry, G. H. dan T. M. (2008). *The Palestine-Israel Conflict: A Basic Introduction Second Edition*. London: Pluto Press.
- George Lenczowski. (1993). *Timur Tengah di Kancah Dunia, alih bahasa Asgar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Hasan Al-Banna. (1986). *Risâlah al-Mu`tamar al-Khamîs, dalam Majmû`ah Rasâil Hasan al-Banna*. Beirut: al- Mu'assasah al-Islamiyah li al-Thaba`ah wa al-Shahafah wa al- Nashr.
- Ibrahim, E. H. (2013). *From Prison to Palace: The Muslim Brotherhood's Challenges and Response in Post Revolution Egypt*, House of Wisdom Center for Strategic Studies. Egypt: tp.
- Karen Amstrong. (2001). *Berperang Demi Tuhan, alih bahasa*. Jakarta: Serambi.

- Mahmud, A. A. H. (1997). *Ikhwanul Muslimin; Konsep Gerakan Terpadu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mitchell, R. P. (1968). *The Society Of The Muslim Brothers*. London: Oxford University Perss.
- Mulkhan, A. M. (1996). *Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir*. Jogjakarta: Sipsess.
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- NN. (1981). *Religion and Politics in Middle East* (M. Curtis, Ed.). TT: Boulder.
- NN. (2007). *The Yom Kippur War October 1973*. Jakarta: Gramedia.
- Noer, A. T. (2009). Perjuangan Mencari Bentuk Negara Palestina Antara Islamis dan Nasionalis. *Urnal PKTTI UI Jakarta, Vol. IV*.
- Paison, M. (2009). *The History of the Muslim Brotherhood: The Political, Social and Economic Transformation of the Arab Republic of Egypt*".
- Quthb, S. (2012). *Limaadzaa A'dzamuunii?* Yogyakarta: Darul Uswah.
- Rahmat, M. I. (2002). *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rizqa, H. (n.d.). *Syekh Ahmad Yassin, Pejuang Palestina yang Melegenda*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/12/07/oht2g9313-syekh-ahmad-yassin-pejuang-palestina-yang-melegenda>
- Ruslan, U. A. M. (1989). *al-Tarbiyah al- Siyâsiyah `inda al-Jama`ah al-Ikhwân al-Muslimîn fi al-Fathrah min 1928 ilâ 1954 fi Mishr*. Kairo: Dâr al-Tauzi` wa al-Nashr al- Islâmiyah.
- Sahwal, A. H. (2014). *Phenomena of Frozen Democracy in Egypt since 2011-2013*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Siddiq, M. (2003). *Pemikiran dan Manhaj Politik Ikhwanul Muslimin*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.
- Sihbudi, R. (1991). *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Syaikh, J. M. (2013). *Ikhwanul Muslimin: Deskripsi, Jawaban Tuduhan dan Harapan* (H. Aulia, Ed.). Indonesia.
- T. Shireen Hunter. (2001). *Politik Kebangkitan Islam Keragaman dan Kesatuan*.. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- V, N. K. (2013). *Egypt's Political Economy and The Downfall of The Mubarak Regime*. Canada: Department of Economic Laurentian University.
- Yaqub, A. M. (2015, June 5). Zionisme dan Isu Disintegrasi. *Republika*.
- Yusuf, A. (Ed.). (2004). *Genderang Jihad Wanita Palestina*. Jakarta: COMES.
- Ziad, M. (2011). Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Moslem Brotherhood. *The Sociological Quarterly, Vol. 42 No. 4*